

Sosialisasi Menggunakan *Haksuara* Dan *Don't Abstain* Pada Pemilu 2024 Untuk Generasi Muda Di Desa Bongohulawa

Ramla Hartini Melo¹, Alim S. Niode², Cindy Lasulika³, Muhammad Rejki Zakaria⁴

^{1,4} Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo

² Fakultas Pertanian Jurusan Peternakan, Universitas Negeri Gorontalo

³ Magister Pendidikan Geografi, Pascasajana, Universitas Negeri Gorontalo
email: ramla.hartini_melo@ung.ac.id

Abstract

People who do not exercise their right to vote while voting are called abstainers. When it comes to the 2024 elections, the company needs to understand the negative consequences of not participating and develop countermeasures. In Indonesia, the process of strengthening political awareness and government actions to preserve Pancasila and the 1945 Constitution is known as "military training for youth". Their main characteristics are their strong sense of duty and their desire to pass on their traditions to future generations. In this context, the access and information needed to participate in the elections are of great importance. This research uses educational, participatory, observational and campaign methods to help people understand how to be honest and trustworthy. MBKM will be held in Bongohulawa Village between January 16 and February 20, 2024. During implementation, this event will be controlled by the MBKM Planning Committee and the local government with strict and strict supervision. This study aims to increase political awareness and participation in society through various social and educational activities.

Keywords: Campaign; Voting Rights; Election 2024

Abstrak

Orang-orang yang tidak menggunakan hak suara mereka saat memilih disebut abstainers. Ketika datang ke pemilihan 2024, perusahaan perlu memahami konsekuensi negatif dari tidak berpartisipasi dan mengembangkan countermeasures. Di Indonesia, proses memperkuat kesadaran politik dan tindakan pemerintah untuk melestarikan Pancasila dan Konstitusi 1945 dikenal sebagai "latihan militer untuk pemuda". Karakteristik utama mereka adalah rasa tanggung jawab yang kuat dan keinginan mereka untuk menyampaikan tradisi mereka kepada generasi mendatang. Dalam konteks ini, akses dan informasi yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam pemilu sangat penting. Penelitian ini menggunakan metode pendidikan, partisipatif, observasi dan kampanye untuk membantu orang memahami bagaimana menjadi jujur dan dapat dipercaya. MBKM akan diselenggarakan di Desa Bongohulawa antara 16 Januari hingga 20 Februari 2024. Selama pelaksanaan, acara ini akan dikendalikan oleh Komite Perencanaan MBKM dan pemerintah setempat dengan pengawasan yang ketat dan ketat. Studi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi dalam masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan pendidikan.

Kata Kunci: Kampanye; Hak Suara; Pemilu 2024

1. PENDAHULUAN

Pengenalan kedaulatan publik berarti bahwa rakyat menguasai, membimbing aspirasi politik rakyat, menentukan kebijakan rakyat, dan menunjuk pemimpin dan kandidat legislatif yang akan membuat undang-undang, yang akan membentuk dasar semua partai politik di Indonesia. Pemilu sebagai suatu proses secara opsional (Utami et al., 2020). Alat demokratis yang penting untuk memastikan pengawasan yang lebih baik adalah kemampuan masyarakat umum untuk memilih. Walau bagaimanapun, isu abstentionisme, juga dikenali sebagai abstencionisme, telah menjadi isu utama dalam gelombang pemungutan suara baru di banyak negara, termasuk Indonesia. Pemilih yang tidak melaksanakan hak pilihannya pada hari pemilihan disebut abstain. Dengan pemilihan 2024, orang perlu memahami konsekuensi negatif dari tidak memilih dan mengembangkan strategi untuk memerangi mereka. (Karim et al., 2020).

Opini publik atau pemilu adalah indikator dan barometer penting dalam sistem demokrasi. Kesejahteraan rakyat dijamin, masyarakat diperkuat dan pemilihan adalah jaminan demokrasi.

Penemuan ini muncul dengan transmisi bahasa sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi dari populasi umum, juga dikenal sebagai sosialdemokrasi. (Azwar et al., 2020). Oleh karena itu, pemilihan dapat dilihat sebagai indikator kedaulatan manusia. “Terima kasih Tuhan, ada kemiskinan di luar batas. Selain itu, pihak-pihak yang tidak dapat membuat keputusan memiliki metode dan strategi sendiri untuk mempertahankan hukum dan mencapai hasil yang diinginkan. (Yunus, 2020). Akibatnya, rakyat dapat mengendalikan pemerintah untuk mencapai tujuan politik, seperti yang terlihat dalam demokrasi. (Diperkirakan pada tahun 2020)

Selain itu, berinteraksi dengan rekan-rekan Anda memberi Anda kesempatan untuk meningkatkan keterampilan sosial dan mengenali kesalahan Anda sendiri. Sebagai anggota masyarakat demokratis, setiap warga negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk bekerjasama dalam melindungi kepentingan mereka dan mengurangi dampak negatif dari hukum pada kehidupan mereka. Keluhan (2023). Dengan menggunakan hak pilihnya, warga dapat berpartisipasi dalam isu-isu kepentingan nasional dan meningkatkan kualitas hidup di tingkat nasional. Sehingga tidak sampai (2022). Kolaborasi diperlukan antara pemerintah, organisasi, masyarakat umum, dan organisasi masyarakat sipil untuk memberikan informasi yang akurat dan komprehensif tentang risiko dan konsekuensi penolakan alkohol. Salpina dan Yusrin, 2023 Penurunan pendidikan politik dan komunikasi politik terkait, atau hampir sepenuhnya, dengan pendidikan politik di sekolah. (Akmaledin, 2022). Selain itu, pendidikan politik sering dianggap sebagai cara untuk meningkatkan sistem politik masyarakat secara keseluruhan sehingga orang dapat memahami prinsip-prinsip penting hukum dan politik. Menggunakan perilaku dan personil untuk mencapai tujuan politik (Hasibuan, 2022). Di sisi lain, pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang politik sehingga masyarakat dapat memainkan peran aktif sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan demokrasi yang diterima, dipertahankan dan diselaraskan oleh masyarakat. Anda dapat menguatkan hubungan Anda dengan Tuhan dengan memperkuat tekad dan kerendahan hati Anda dan mengambil peran aktif dalam memenuhi tanggung jawab Anda. (Zulfa, 2019) Menjadi di sana dapat membantu Anda mempertahankan iman Anda, merasa baik, dan memenuhi tanggung jawab Anda. (Zulfa, 2019).

Pancasila and the Policy and Government Report on Citizenship in Support of the 1945 Constitution adalah proses memperluas kewarganegaraan untuk meningkatkan pemahaman, minat dan partisipasi; mendorong filsafat politik untuk mempromosikan kecerdasan penuh secara sosial, ekonomi, demokratis dan hukum; Hal ini memperkuat pemahaman politik. Nilai yang Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Konstitusi 1945 dan peran penting institusi dalam nilai-nilai masyarakat dalam perjuangan rakyat untuk hak dan tanggung jawab (Polii, 2020).

Undang-Undang Pemilu Internasional (IDEA), hukum pemilu internasional, berisi lima belas artikel yang berfokus pada integritas pemilu. (Mokonczuk and Romaniuk, 2019). Salah satu kriteria yang paling penting adalah desain yang tepat, yang dapat digunakan untuk mengkonfirmasi keputusan. Memelihara hubungan dengan pemilihan pengawas juga penting. Jadi prioritasnya adalah siapa yang akan memastikan pemilihan berlangsung dengan cara yang demokratis. Kualitas demokrasi ditentukan oleh negara. Undang-undang ini berfungsi sebagai panduan bagi semua pemerintah di Indonesia untuk memenuhi tanggung jawabnya. (Utami et al., 2020).

Badan Pemantauan Pemilu Nasional (BAWASLU) bertanggung jawab atas implementasi, pemantauan dan evaluasi dalam konteks pemilu 2024. Bawaslu melakukan semua yang mungkin dan mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah kekuatan kelompok putih (golput) terus meningkat dan untuk memastikan bahwa pemilihan 2024 berlanjut tanpa kelompok putih. (golput). Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang ditempatkan oleh penulis adalah: Apa langkah-langkah yang diambil Bawaslu untuk mencegah penipuan dalam pemilihan 2024 (Fachryzal. et.) lainnya, (2023).

Pemilu adalah pilar paling penting dari sistem demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk memilih pemimpin dan pemimpin mereka. Tetapi keterlibatan karyawan sering menjadi hambatan, terutama di seluruh generasi. Karena masalah ini, terutama kurangnya kepercayaan, kurangnya pengetahuan politik, dan kurangnya infrastruktur politik dan pendidikan, orang muda cenderung kurang terlibat dalam proses pemilihan. Komisi Hukum Nasional tahun 2020.

Desa Bongohulawa, yang memiliki populasi yang cukup besar, menghadapi masalah yang mengancam pemilihan 2024. Hal ini dapat berdampak negatif pada kualitas demokrasi dan representasi politik di wilayah tersebut. Ini adalah masalah kognitif pada orang muda yang mengembangkan kebutuhan perhatian khusus, apati, atau kendali diri. (inability to use their right

hand). Dalam konteks ini, akses dan informasi yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam pemilu sangat penting. Tujuan dari program “Ntukirinde” yang dilaksanakan di desa Bongohulawa adalah meningkatkan pengetahuan politik dan partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan pendidikan. Namun, untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, efektivitas program perlu dievaluasi dan ditingkatkan. Ini adalah mimpi (2019).

Masalah-masalah berikut dapat diidentifikasi dalam komunikasi kampanye 'Ntukirinde' dan penggunaan tongkat di desa Bongohulawa: Keterlibatan politik di kalangan pemuda: Produk memahami peran mereka dalam pemilihan dan dampaknya pada masa depan mereka dan masyarakat. Akses yang tidak memadai ke informasi dan pendidikan: Informasi tentang kebijakan dan proses legislatif sering tidak disajikan secara efektif kepada orang muda karena saluran komunikasi yang tidak efektif atau materi yang ditulis dengan buruk yang sulit dimengerti. Ketidakpercayaan dalam politik: Banyak orang muda percaya bahwa sistem politik saat ini tidak peduli dengan kebutuhan mereka atau mampu menciptakan perubahan positif. oleh karena itu mereka apatis. Efektivitas Program Sosialisasi Masih Rendah: Beberapa program sosialisasi mungkin tidak terbaik dalam mempengaruhi dan mempertahankan generasi muda, baik melalui desain program, frekuensi kegiatan, atau relevansi material. 5. Efek negatif pada Norma Sosial dan Agama: Norma sosial dan agama di Desa Bongohulawa mungkin agak merusak atau sangat merugikan partisipasi politik generasi muda. Itulah sebabnya mereka tidak merespon pesan. Efisiensi program outreach tetap rendah: Beberapa program Outreach mungkin tidak efektif dalam mengubah dan mempertahankan pemuda dalam hal pemrograman, frekuensi, atau efektivitas sumber daya. Dampak Negatif Sosial dan Agama: Norma-norma sosial dan agama di desa Bongohulawa dapat berbahaya atau sangat berbahaya bagi partisipasi politik kaum muda. Kami percaya bahwa mengetahui isu-isu ini akan menciptakan strategi yang efektif untuk menjangkau publik sehingga pemuda dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum 2024 dan menggunakan sumber daya mereka secara efektif dan efisien.

2. METODE

Metode manajemen kapasitas dengan empat fungsi manajemen: perencanaan, organisasi, mengambil tindakan pencegahan dan kontrol diimplementasikan sebagai organisasi publik (Rizky et al., 2021). Terry mendefinisikan manajemen sebagai proses mengarahkan dan membimbing sekelompok orang menuju tujuan dan tujuan organisasi. Menurut Terry, kepemimpinan didefinisikan sebagai metode atau strategi untuk mencapai tujuan dengan secara bertahap menentukan apa yang perlu dilakukan.

Penelitian ini menggunakan berbagai metode, termasuk pendidikan, partisipasi, pemantauan / kontrol, dan advokasi, untuk membantu masyarakat memahami bagaimana membuat keputusan yang etis dan adil.

1. Metode Edukasi:

- a. Sosialisasi: Menyebarkan informasi tentang pemilu ke komunitas desa melalui penyebaran tentang teknik penghapusan bunga yang tepat dan benar.
- b. Pendidikan: Melatih penduduk desa untuk menjadi cerdas, memahami sistem dan proses pemilu, dan melindungi hak pemilu yang sedang dilanggar oleh bawaslu dan KPPS Bongohulawa.
- c. Informasi tentang subjek bocor melalui media sosial, misalnya, melalui berbagai sumber tentang subjek.

2. Metode Partisipasi:

Simulasi pemilu: Pemilu pelaksanaan Simulasi masyarakat untuk membantu memahami proses pemungutan dan penghitungan suara dengan ditunjukkan oleh sistem desa, bawaslu, kpps, dan aparat desa lainnya.

3. Metode Pemantauan dan Pengawasan:

Pengamatan jalannya pemilu untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi. Pengawasan pemilu: Pengawasan pemilu kepada Bawaslu.

Dalam kasus lain, Anda meninjau dan mengevaluasi tugas yang selesai terhadap tujuan asli. Oleh karena itu, siswa MBKM/KKN akan bergabung dengan sejumlah kecil partai demokrasi/etnis setiap

lima tahun. Mahasiswa MBKM/KKN ingin berbagi pengetahuan dan menjadi model bagi anak-anak dan pemuda Desa Bongohulawa dalam menjalankan pemilu 2024.

Pancasila, ibukota Indonesia, dibagi menjadi tiga cabang utama: Nasional, Nasional dan Nasional. Berkat Pancasila, kebijakan nasional Indonesia akan mampu mengatasi masalah internal dan eksternal. Ideologi utama Indonesia adalah Pancasila. Nama Pancasila berasal dari dua kata Sanskrit. Pankasila mewakili lima sedangkan Shira mewakilkan prinsip atau prinsip. Dalam rangka Pancasila, semua warga Indonesia dijamin hidup sehat dan aman. (Iswardhana et al., 2023).

Indonesia, negara paling demokratis keempat di dunia, akan memiliki populasi yang paling maju di dunia pada tahun 2024. Sekitar 74 persen orang Indonesia bekerja, dan sebagian besar dari mereka adalah pekerja mandiri. Pada 14 Februari 2024, lebih dari 200 juta warga Indonesia dan 1,75 juta orang Indonesia di seluruh dunia akan memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu presiden juga akan digelar pada hari yang sama. (Amir, 2020).

Kami percaya bahwa generasi milenial atau generasi saat ini akan memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam doa dan tindakan mereka. Karena sebagai generasi kita kekurangan kemauan untuk membangun bangsa Indonesia sehingga kita bisa berdagang dengan negara-negara lain. Generasi ini telah mencapai usia yang tepat untuk kegiatan produktif. Anak-anak mudah beradaptasi dengan dunia luar. Generasi Y dapat memecahkan berbagai masalah. Dari kehilangan patriotisme ke apatisme terhadap rakyat. Masalah umum yang mencerminkan masalah ini di Indonesia adalah tingkat kerusakan diri yang tinggi. Ada banyak kasus di mana pemuda tidak ikut serta dalam pemilu. Kurangnya pemahaman tentang politik perempuan dan Pancasila berkontribusi pada perkembangan ini. (Iswardhana, 2020).

Pemilu umum (PEMILU) memainkan peran positif dalam pengembangan negara, pertama: Pemilu adalah salah satu pilar yang paling penting dari demokrasi. Dalam masyarakat yang demokratis, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin. Pemungutan suara memungkinkan orang untuk mengekspresikan pandangan mereka dan memilih perwakilan yang mewakili kepentingan mereka di pemerintahan. Ini memberi warga suara dalam pemerintahan mereka dan membuat keputusan lebih efektif. Selain itu, Pemilu mendorong warga untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Ini tidak hanya berlaku untuk presiden atau parlemen, tetapi juga untuk pemerintah regional. Partisipasi politik yang lebih besar dapat membantu mendorong perdebatan dan diskusi yang dinamis tentang isu-isu praktis. Ketiga, pemilihan memberikan orang-orang dengan visi dan kepemimpinan kesempatan untuk sukses dan berkembang. Ini dapat menghasilkan pemimpin yang mampu dan bertekad untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Dalam pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Jika manajer tidak menyelesaikan atau mengelola perjanjian kampanye dengan benar. Ini mendorong para pemimpin untuk sepenuhnya berkomitmen pada tujuan mereka. Akhirnya, pemilihan menawarkan berbagai kelompok dan masyarakat umum kesempatan untuk diwakili di parlemen. Penting untuk memastikan bahwa semua pandangan dan perilaku dipahami dan dihormati. Salah satu cara resmi untuk menunjuk pemimpin dan pemerintah adalah melalui pemilihan. Dengan cara ini, suara kualifikasi pemerintah yang terpilih. Pemerintah yang terpilih memiliki wewenang nyata untuk mengambil langkah-langkah untuk pengembangan negara. Akhirnya, pemilihan memungkinkan orang biasa untuk memantau proses politik dan militer. Dengan pemilihan yang transparan, adil dan terbuka, masyarakat umum dapat yakin bahwa keinginan mereka akan terpenuhi melalui pengawasan dan manajemen yang efektif. Ini untuk memastikan bahwa kebijakan negara didasarkan pada kebutuhan rakyatnya.

Kampanye ini mengajarkan kepada pemuda pentingnya meningkatkan kesadaran politik berdasarkan pengalaman rakyat Pancasila. Dengan penunjukan Pancasila sebagai lembaga nasional, generasi mendatang akan semakin menyadari komitmen kita terhadap masa depan negara dalam siklus pemilihan 2024. Diperkirakan ini akan meningkatkan perkembangan negara. Agar generasi-generasi masa depan dapat dengan mudah memilih pemimpin yang akan melindungi nilai-nilai negara sesuai dengan nilai mereka sendiri.

1. Protes pemilihAktivitas ini dilakukan untuk mendidik orang, terutama pengunjung baru ke desa Bongohulawa, yang sebagian besar tidak menyadari masalah yang berkaitan dengan penggunaan TPS oleh petani tutei. Siswa juga menjelaskan pentingnya menggunakan akal sehat dan menghindari GOLPUT (non-evasion) dalam pemilihan 2024.
2. Melakukan audit pemilu
Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memastikan bahwa peraturan tempat pengujian yang berlaku diikuti dan bahwa proses pelatihan dilakukan dengan cara yang tenang, bersih, aman dan efisien untuk mencapai hasil tes yang diinginkan. Ini akan dilakukan untuk memastikan bahwa yang di atas dijamin.
3. Rekrutmen Relawan Pemilu Yang Berintegritas
Latihan ini dilakukan untuk mengevaluasi properti yang sedang dikembangkan di desa Bongohulawa dan terlibat melalui pemantauan pemilu dan kolaborasi untuk mencegah kekerasan dan ketidakadilan untuk membuat Pemilu 2024 kuat dan adil.
4. Pendataan 10 Tokoh Berpengaruh
Latihan ini dilakukan untuk membantu mereka yang mengalami masalah lebih memahami orang-orang yang tinggal di desa Bongohulawa. Informasi yang diberikan oleh warga dapat digunakan untuk menganalisis tren politik saat ini dan mengidentifikasi kelompok orang di antara yang sulit untuk memilih.
5. Kampanye Masal Pemilu Berintegritas 2024
6. Aktivitas ini bertujuan untuk mendidik masyarakat agar tidak tertipu oleh penampilan atau perilaku mereka. Hal ini juga tercermin dalam video kampanye media “Elections with Integrity” yang dipublikasikan di media sosial oleh peserta proyek MBKM di desa Bongohulawa yang berkomitmen untuk misi perlindungan mereka.
7. Masa Tenang Pemilu
Proses penghapusan identitas semua partai, kandidat presiden, kandidat parlemen dan lainnya dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk memastikan keamanan dan keamanan masyarakat, mencegah konflik, dan menciptakan lingkungan netral. Memberikan kesempatan kepada orang untuk memikirkan pilihan masa depan mereka. Baik untuk Indonesia dan ikuti aturan pemilu.
8. Hari Pelaksanaan

Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin integritas dan keamanan pemilu, membantu pengawasan proses pemilu, termasuk pemungutan suara, penghitungan suara, dan pengawasan kotak suara, serta memastikan seluruh proses dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak ada penipuan.

a. Faktor Pendukung

Sebagai Mahasiswa Peserta MBKM, saya desamerkan bahwa pendorong kegiatan yang saya alami di tingkat lokal adalah bahwa kegiatan tersebut diterima dengan baik tidak oleh masyarakat Desa Bongohulawa, tetapi juga oleh penyelenggara pemilu di desa tempat kami bekerja. Untuk mencapai PEMILU pada tahun 2024. Dalam kapasitas saya sebagai Desa MBKM Proyek Mahasiswa, ayah dan ibuku sangat membantu dalam membantu kami menerapkan program MBKM dan memilih siswa yang jujur dan berkomitmen terhadap tujuan bersama kami.

b. Faktor Penghambat

Satu hal yang saya perhatikan ketika saya mahasiswa MBKM di Desa Bongohulawa adalah sifat menantang pertanyaan dan banyak hambatan yang muncul dalam setiap subjek, sehingga saya akhirnya sakit karena pola tidur yang tidak teratur. Salah satu faktor yang berkontribusi, mahasiswa, tidak banyak diperhatikan dalam program MBKM Proyek Desa Bongohulawa..

Gambar 2. Melakukan Agitasi atau penyuluhan ke



masyarakat dan aparat desa terkait dengan cara pencoblosan yang baik dan benar (tidak golput)

Gambar 3. Pendataan 10 Tokoh berpengaruh

4. KESIMPULAN

Pengabdian generasi ini adalah upaya untuk memberikan ambang batas golput yang tinggi untuk anak-anak milenial. Hal ini dilakukan melalui sosialisasi generasi muda. Selain itu, generasi muda lebih cenderung menyerap pengetahuan yang baik, khususnya tentang kebutuhan mereka untuk mempersiapkan pemilu 2024 yang akan datang. Ini adalah isu yang sangat penting bagi kaum muda karena, pada awal sejarah Indonesia, negara ini dikuasai oleh sebuah monarki yang hanya akan bertahan selama beberapa tahun. Orang-orang yang tidak mendukung kesatuan nasional dapat dikalahkan jika populasi tidak berpartisipasi dalam pemerintahan dan tidak memberikan kepemimpinan. Oleh karena itu, generasi muda memiliki kesempatan untuk menjadi lebih bijaksana dan memahami kebutuhan untuk menyelamatkan masa depan bangsa kita. Di sisi lain, hasil pemungutan suara dapat mempengaruhi kekuatan dan pengaruh partai politik dalam pemerintahan. Hasil keseluruhan program MBKM pemilu di Desa Bongohulawa adalah bahwa ini merupakan langkah yang jelas menuju peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, khususnya dalam konteks pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmaluddin, A., & Wempie, M. A. R. (2022). Budaya Politik Pemilih Milenial Dalam Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 49-57.
- Amir, M. (2020). Kesenjangan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(2), 115–131. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41>
- Azwar, W., Hasanuddin, H., Muliono, M., Permatasari, Y., Amri, M. U., & Yurisman, Y. (2020). Model-model Pemerintahan Adat Nagari di Sumatera Barat. *Jurnal Bina Praja*, 12(1), 33-42. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.33-42>.
- Fachryzal M., & Hendra W. (2023). Efektivitas Strategi Bawaslu untuk Mencegah Suara Golput pada Pemilu 2024. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 10(6), 7796-7797.
- Hasibuan, R. S., Syuhanda, A., Fachrurrozy, M., Efendi, S., & Idris, F. (2022). Wawasan Kebangsaan untuk Kaum Milenial. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 10823-10828.
- Iswardhana, M. R. (2020). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Merajut Kebinekaan dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri*. PT Kanisius.
- Iswardhana, M. R. (2023). Meninjau Kembali Kasus Suap Jaksa Pinangki Berdasarkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan Keadilan Sosial. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 1081–1088.
- Iswardhana, M. R. (2023). Pengantar Kewarganegaraan: Membentuk Warga Negara Yang Berkualitas. In *PENGANTAR KEWARGANEGARAAN: Membentuk Warga Negara Yang Berkualitas*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Iswardhana, M. R., Arisanto, P. T., Chusnul Chotimah, H., Wibawa, A., Risky, L., & Setyo Pratiwi, T. (2023). Sosialisasi Pendidikan Politik Menyongsong Pemilu 2024 Terhadap Generasi Z Di SMAN 4 Yogyakarta. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 2(1), 6–10. <https://doi.org/10.56127/jammu.v2i1.574>
- Karim, A. M., Wibawa, A., & Arisanto, P. T. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Media Sosial (Studi Deskriptif Tingkat Dan Pola Politik Partisipatif Gen-Z Kota Yogyakarta Melalui Pemanfaatan Aplikasi Instagram Tahun 2019). *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3(2), 116–122.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2020). *Laporan Partisipasi Pemilih Pemilu 2019*. Jakarta: KPU.
- Mokhonchuk, B., & Romaniuk, P. (2019). Menuju Kerangka Hukum yang Melindungi Kebebasan Berekspresi dalam Proses Pemilihan Umum. *Baltic Journal of European Studies*, 9(3), 43-62. <https://doi.org/10.1515/bjes-2019-0021>

- Napsawati, N. (2020). Analisis Situasi Pembelajaran IPA Fisika dengan Metode Daring di Tengah Wabah Covid-19. *Karst: Jurnal Pendidikan Fisika dan Terapannya*, 3(1), 96–102. <https://doi.org/10.46918/karst.v3i1.546>
- Nugroho, H. (2019). "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilu di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(2), 158-174.
- Nur Hayati, N. (2022). Urgensi Pelibatan Generasi Muda Dalam Pengawasan Partisipatif Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 Yang Demokratis. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(1), 23–34. <https://doi.org/10.55108/jkp.v2i1.143>
- Poli, E. Z. F., Pati, A. B., & Potabuga, J. (2020). Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik Kaum Milenial Dalam Pemilihan Umum di Kecamatan Tarean Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 9(3).
- Rizky, L., Pratiwi, T. S., Chotimah, H. C., Iswardhana, M. R., Wibawa, A., & Arisanto, P. T. (2021). Budidaya Jamur pada Ibu-Ibu Rumah Tanga di Dusun Kruwet untuk Mewujudkan SDGs 2030. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 177–185. <https://doi.org/10.25008/altifani.v1i3.155>
- Teka, S. S. (2020). Dialektika Demokrasi dalam Bingkai Politik Primordialisme Pilkada. *Jurnal Bina Praja*, 12(2), 193-201. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.193-201>
- Utami, B. H. S., Herinanto, D., Gumanti, M., & Purwanto, B. (2020). Money Politic vs Political Marketing (Case Study: Legislative Election of the Pringsewu District Legislative Council Members for the 2019-2024 Period). *Jurnal Bina Praja*, 12(2), 125–136. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.125-136>
- Wahdini, M. (2020). Paradigma Simbiotik Agama dan Negara (Studi Pemikiran Ahmad Syafi'i Maarif). *Journal of Islamic and Law Studies (JILS)*, 4(1), 17–32. <https://doi.org/10.18592/jils.v4i1.3701>
- Yunus, A. (2020). Demokrasi Berlapis di Papua: Perbandingan Sistem “Noken” dan Sistem Electoral College Sistem Electoral College di Amerika Serikat. *Hasanuddin Law Review*, 6(3), 232-239. <https://doi.org/10.20956/halrev.v6i3.2892>
- Yusrin, Y., & Salpina, S. (2023). Partisipasi Generasi Millenial dalam Mengawasi Tahapan Pemilu 2024. *Journal on Education*, 5(3), 9646–9653. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1842>